



**LAPORAN**

**CAPAIAN RENCANA KERJA**  
**TAHUN 2019**  
**DAN**  
**CAPAIAN RENCANA STRATEGIS**  
**TAHUN 2015 - 2019**

**PUSAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM**



# KATA PENGANTAR

Laporan Capaian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM (Pusrenbang SDM) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusrenbang SDM selama tahun 2019 dan pencapaian kinerja Pusrenbang SDM berdasarkan Renstra tahun 2015-2019. Penyusunan laporan ini sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), laporan tersebut merupakan salah satu unsur penilaian dalam SAKIP.

Laporan Capaian Rencana Kerja Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis Tahun 2015-2019 diharapkan dapat memberi informasi kinerja dan gambaran pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang perencanaan dan pengembangan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Laporan ini, selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada kurun waktu yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan puji syukur atas capaian Rencana Kerja Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis Tahun 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam laporan ini. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, diucapkan terima kasih dan semoga dapat bermanfaat serta dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, Februari 2020  
Kepala Pusat,  
  
Ade Paiguna  
NIP. 19650924 199303 1 001



# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Landasan Hukum.....	2
<b>BAB II ORGANISASI BADAN P2SDM</b> .....	4
A. Tugas dan Fungsi .....	4
B. Organisasi .....	4
C. Sumber Daya Manusia .....	5
<b>BAB III RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019 DAN RENCANA KERJA PUSRENBANG SDM TAHUN 2019</b> .....	6
A. Rencana Strategis (Renstra) Pusrenbang SDM Tahun 2015-2019 .....	6
1. Sasaran Kegiatan Pusrenbang SDM .....	6
2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusrenbang SDM Tahun 2015-2019 .....	7
B. Rencana Kerja Pusrenbang SDM Tahun 2019.....	8
1. Target Rencana Kerja Pusrenbang SDM Tahun 2019 .....	8
2. Pembiayaan Tahun 2019 .....	9
<b>BAB IV EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN PELAKSANAAN RENJA PUSRENBANG SDM TAHUN 2019 DAN RENSTRA PUSRENBANG SDM TAHUN 2015-2019</b> .....	11
A. Capaian Renja Pusrenbang SDM Tahun 2019.....	11
B. Capaian Rencana Strategis (Renstra) Pusrenbang SDM Tahun 2015-2019...	17
<b>BAB V REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019</b> .....	24
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	26

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Keterkaitan Sasaran Program Badan P2SDM dan Sasaran Kegiatan Pusrenbang SDM Tahun 2015-2019 .....	6
Tabel 2.	Indikator Kinerja Kegiatan Pusrenbang SDM Tahun 2015-2019 .....	7
Tabel 3.	Indikator Kinerja dan Prakiraan Target Tahun 2015-2019 .....	8
Tabel 4.	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusrenbang SDM Tahun 2015-2019 .....	8
Tabel 5.	Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Badan P2SDM Tahun 2019 .....	9
Tabel 6.	Alokasi Pagu Anggaran Pusrenbang SDM Tahun 2019 .....	10
Tabel 7.	Capaian Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan SDM Tahun 2019 .....	11
Tabel 8.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusrenbang SDM Sampai Tahun 2019 .....	17
Tabel 9.	Progres SDM LHK meningkat kompetensinya berdasarkan jenis jabatan s.d Tahun 2019 .....	22
Tabel 10.	Realisasi Anggaran Kegiatan lingkup Pusrenbang SDM Tahun 2019 .....	24

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Pusrenbang SDM .....	5
Gambar 2.	Jumlah Pegawai Pusrenbang SDM .....	5
Gambar 3.	Rincian Tenaga Bakti Rimbawan berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	13
Gambar 4.	Sebaran Tenaga Bakti Rimbawan yang aktif sampai Tahun 2019 .....	13
Gambar 6.	Rincian Peserta Uji Berdasarkan Jenis Jabatan.....	15
Gambar 7.	Kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi .....	16
Gambar 8.	Realisasi tenaga Bakti Rimbawan Tahun 2015-2019 .....	18
Gambar 9.	Realisasi SDM LHK Kompeten Tahun 2015-2019 .....	22

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Eksistensi dan keberhasilan suatu organisasi sangat didukung oleh keberadaan sumber daya manusia sebagai pelaksana pekerjaan. sumber daya manusia menjadi salah satu faktor pendukung dan penentu berjalannya tugas pokok dan fungsi organisasi. Peranan sumber daya manusia adalah partner strategis organisasi yang berarti bahwa semua lini operasi organisasi tidak dapat berjalan tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, baik ditinjau dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dalam mewujudkan eksistensinya untuk mencapai tujuan, suatu organisasi memerlukan perencanaan sumber daya manusia yang efektif guna menjamin tersedianya sumber daya manusia yang tepat untuk menduduki berbagai posisi, jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusrenbang SDM merupakan unit Eselon II Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang mempunyai tugas dalam Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur dan Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dinamika dan tantangan kekinian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pusrenbang SDM didukung oleh tiga bidang yaitu Bidang Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan Pengembangan SDM Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Bidang Standarisasi dan Sertifikasi SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan operasional dan dukungan manajemen perkantoran, Pusrenbang SDM didukung oleh Sub Bagian Tata Usaha.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2019, Pusrenbang SDM menyusun Rencana Kerja Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Tahun 2019. Selanjutnya, untuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renja Tahun 2019 dan Rencana Strategis Tahun 2015-2019, Pusrenbang SDM menyusun laporan capaian Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Tahun 2015-2019. Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan umpan balik bagi pengambil keputusan dalam rangka pemantapan/reviu perencanaan pada waktu yang akan datang.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan laporan ini sebagai pertanggungjawaban Kepala Pusat selaku penanggungjawab kegiatan perencanaan dan pengembangan SDM dalam pencapaian pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan progres pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019 kepada Kepala Badan P2SDM serta Publik. Adapun tujuannya guna memberikan gambaran sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2019 sebagai upaya perbaikan pelaksanaan kegiatan tahun selanjutnya. Selain itu laporan ini juga sebagai bentuk monitoring terhadap capaian pelaksanaan 5 Tahun Renstra Pusrenbang SDM Tahun 2015 – 2019.

## **C. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Renstra Tahun 2015-2019 adalah:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.94/menlhk/setjen/kum.1/10/2018 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019;
10. Peraturan Kepala Badan P2SDM Nomor P.05/SETBP2SDM/2015 tentang Rencana Strategis Badan P2SDM Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Kepala Badan P2SDM Nomor P.13/P2SDM/SET/REN.0/10/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
12. Peraturan Kepala Badan P2SDM Nomor P.5/P2SDM/SET/REN.0/11/2018 tentang Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019.



## **BAB II ORGANISASI BADAN P2SDM**

### **A. Tugas dan Fungsi**

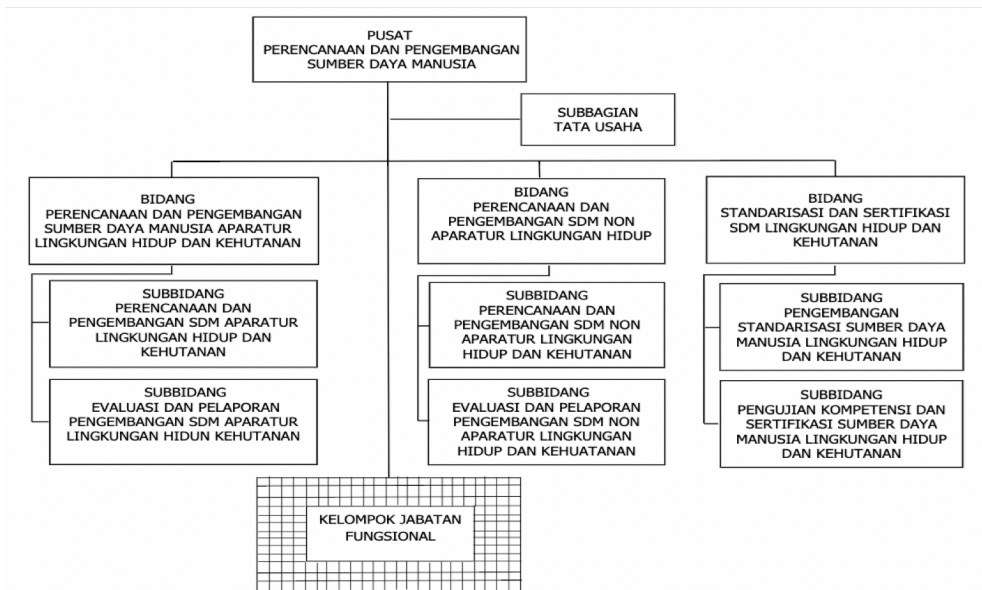
Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusrenbang SDM merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II pada Badan P2SDM yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis perencanaan dan pengembangan sumber daya aparatur dan masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Pusrenbang SDM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, kerja sama dan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, standard kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, standard kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, standard kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan; dan
4. Pelaksanaan administrasi pusat.

### **B. Organisasi**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pusrenbang SDM didukung oleh tiga bidang yaitu Bidang Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan Pengembangan SDM Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Bidang Standarisasi dan Sertifikasi SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan

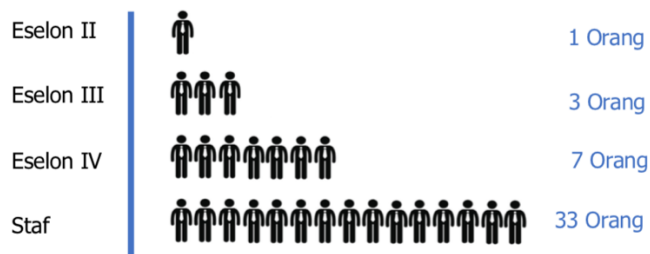
kegiatan operasional dan dukungan manajemen perkantoran, Pusrenbang SDM didukung oleh Sub Bagian Tata Usaha. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menlhk-II/2015, struktur organisasi Pusrenbang SDM sebagaimana disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusrenbang SDM

### C. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Pusrenbang SDM secara keseluruhan sebanyak 44 orang terdiri dari 29 orang PNS dan 15 orang tenaga kontrak, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 2. Jumlah Pegawai Pusrenbang SDM

# BAB III

## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019 DAN RENCANA KERJA PUSRENBANG SDM TAHUN 2019

### A. Rencana Strategis (Renstra) Pusrenbang SDM Tahun 2015-2019

#### 1. Sasaran Kegiatan Pusrenbang SDM

Sebagai salah satu Unit Kerja Eselon II Badan P2SDM, Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM melaksanakan kegiatan yang mendukung sasaran program Badan P2SDM yang tertuang dalam Renstra Badan P2SDM tahun 2015 s/d 2019, yaitu "Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Mendukung Peningkatan Kesimbangan Ekosistem" dengan sasaran kegiatan Perencanaan Pengembangan SDM "**Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan kompeten**" dengan Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Keterkaitan Sasaran Program Badan P2SDM dan Sasaran Kegiatan Pusrenbang SDM Tahun 2015-2019

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Sasaran Kegiatan
Meningkatnya daya saing SDM lingkungan hidup dan kehutanan mendukung peningkatan keseimbangan ekosistem (S3.P5)	Jumlah SDM lingkungan hidup dan kehutanan yang meningkatkan kompetensinya bertambah setiap tahun untuk mendukung peningkatan keseimbangan ekosistem (S3.P5.IKP)	Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan kompeten (S3.P5.K1)

## 2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusrenbang SDM Tahun 2015-2019

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan. Berdasarkan sasaran program yang telah disusun oleh Badan P2SDM kemudian penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Program (IKP) Tahun 2015 – 2019 yang merupakan ukuran keberhasilan dari kinerja organisasi, Pusrenbang SDM memiliki tanggungjawab melaksanakan kegiatan Perencanaan dan Pengembangan SDM dengan Rincian target IKK SDM sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Kinerja Kegiatan Pusrenbang SDM Tahun 2015-2019

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
1. Perencanaan Pengembangan SDM (K1)	Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan kompeten (S3.P5.K1)	<b>a. Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, 15.000 orang (S3.P5.K1.IKK.a)</b> <b>b. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya, 10.400 orang (S3.P5.K1.IKK.b)</b>

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan SDM, Pusrenbang SDM telah menyusun perkiraan capaian target kinerja kegiatan setiap tahunnya mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Indikator Kinerja dan Prakiraan Target Tahun 2015-2019

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2015	Prakiraan Target			
			2016	2017	2018	2019
Perencanaan Pengembangan SDM (K1)	Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan kompeten (S3.P5.K1)					
	a. Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, 15.000 orang (S3.P5.K1.IKK.a)	1.236	600	4.390	4.390	4.384
	b. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya, 10.400 orang (S3.P5.K1.IKK.b)	1.000	500	3.000	3.000	2.900

## B. Rencana Kerja Pusrenbang SDM Tahun 2019

### 1. Target Rencana Kerja Pusrenbang SDM Tahun 2019

Rencana Kerja Pusrenbang SDM Tahun 2019 sebagai kerangka kerja, acuan dalam penyusunan Target Indikator Kinerja dan sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian kinerja. Target rencana kerja Tahun 2019 Pusrenbang SDM sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusrenbang SDM Tahun 2015-2019

No	IKU/IKP	Target 2015-2019	Target 2019
1	Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten.	25.400 Orang	1.497 Orang

Target rencana kerja tahun 2019 tersebut di atas, akan dicapai melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan sasaran dan target sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Badan P2SDM Tahun 2019

Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
<p><b>Perencanaan dan Pengembangan SDM</b></p> <p>Sasaran:  <i>Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM LHK Kompeten</i></p>	<p>a) Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, 197 orang</p>
	<p>b) Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya 1.300 orang</p>

## 2. Pembiayaan Tahun 2019

Dalam rangka mendukung pembiayaan penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan pengembangan SDM, pada Tahun 2019 Pusrenbang SDM didukung alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 15.205.194.000,- yang tertuang pada dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 Satuan Kerja Pusrenbang SDM sesuai dengan Surat Pengesahan Nomor: SP DIPA-029.08.1.400207/2019 tanggal 5 Desember 2018. Kemudian pada bulan Agustus, terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 2.832.470.000,- yang merupakan tambahan anggaran insentif dari Kementerian Keuangan dan pada bulan Oktober terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp 100.000.000,- untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai, sehingga anggaran Pusrenbang SDM pada akhir tahun 2019 sebesar RP. 17.937.664.000. Rincian anggaran Pusrenbang SDM Tahun 2019 disajikan sebagaimana Tabel 6.

Tabel 6. Alokasi Pagu Anggaran Pusrenbang SDM Tahun 2019

Kode	Komponen	PAGU ANGGARAN
5440.001	Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH	10.630.740.000
5440.002	Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	5.432.470.000
5440.950	Penyusunan dokumen rencana kegiatan dan pelaporan	500.000.000
5440.994	Layanan perkantoran	1.374.464.000
<b>JUMLAH</b>		<b>17.937.664.000</b>

## BAB IV

# EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN PELAKSANAAN RENJA PUSRENBANG SDM TAHUN 2019 DAN RENSTRA PUSRENBANG SDM TAHUN 2015-2019

### A. Capaian Renja Pusrenbang SDM Tahun 2019

Keberhasilan Pusrenbang SDM dalam mencapai target pada Rencana Kerja Tahun 2019 dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target Tahun 2019 pada masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan. Sasaran kegiatan Perencanaan dan Pengembangan SDM yaitu tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM LHK kompeten. Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.937.664.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.934.059.310,00 atau sebesar 99,98%. Dengan dukungan anggaran tersebut, capaian kinerja dari kegiatan perencanaan dan pengembangan SDM ini sebesar 105,74 %. Rincian capaian kinerja selengkapnya disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Capaian Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan SDM Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		REALISASI			
	Anggaran	Fisik	Anggaran	%	Fisik	%
Terpenuhinya tenaga bakti rimbawan sebagai tenaga pengelola KPH	12.505.194.000	197	12.503.613.069	99,99	197	100
Terwujudnya SDM LHK yang meningkat kompetensinya	5.432.470.000	1.300	5.430.446.241	99,96	1.386	106,62
<b>JUMLAH</b>	<b>17.937.664.000</b>	<b>1.497</b>	<b>17.934.059.310</b>	<b>99,98</b>	<b>1.583</b>	<b>105,74</b>



Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan SDM terdiri dari 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

**a. Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH.**

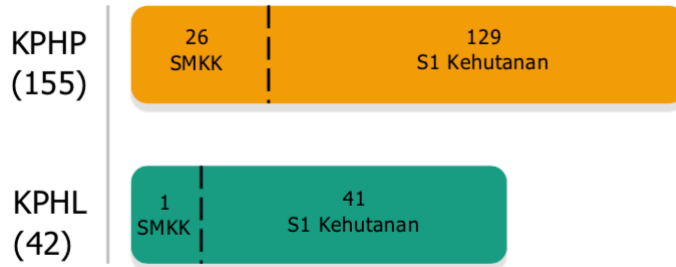


Gambar 3. Perencanaan kegiatan patroli partisipatif Bakti Rimbawan dan masyarakat di KPH Seram Bagian Timur

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai lembaga pengelola kawasan hutan merupakan salah satu kebijakan strategis dalam pembangunan kehutanan. KPH diharapkan dapat berperan aktif dalam pengelolaan hutan mulai dari tingkat tapak, wilayah kelola

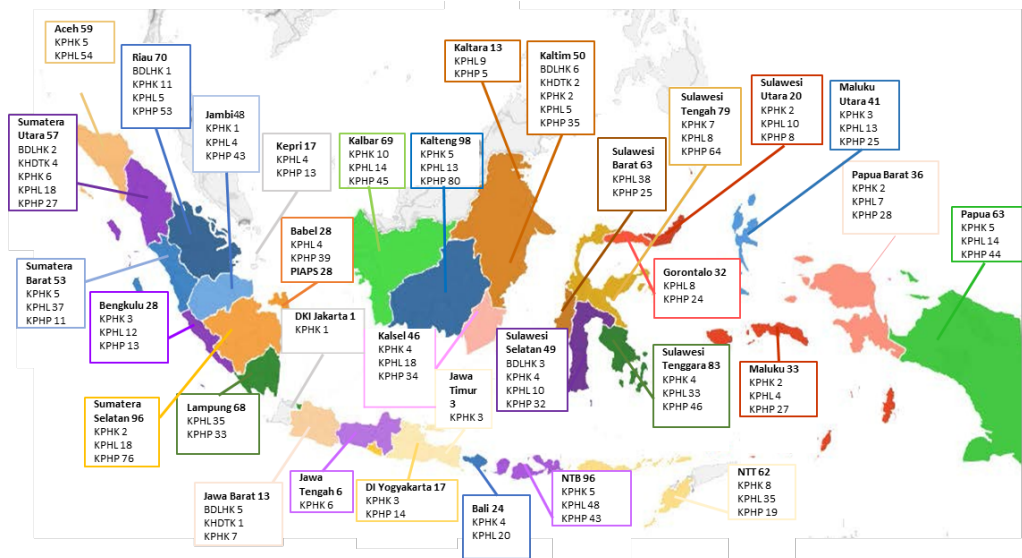
yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di sekitar hutan. Mengingat peran strategis tersebut, KPH harus dikelola oleh SDM yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang salah satunya dengan penyediaan Tenaga Bakti Rimbawan.

Pada Tahun 2019 target awal pembiayaan Tenaga Bakti Rimbawan untuk 228 orang (Renja Badan P2SDM Tahun 2019) yang merupakan hasil rekrutmen pada Tahun 2018, namun dalam pelaksanaannya terdapat 31 orang yang mengundurkan diri di awal dan pertengahan tahun anggaran. Terkait hal tersebut, Badan P2SDM melakukan optimalisasi anggaran dengan mengalihkan alokasi anggaran Bakti Rimbawan pada kegiatan lainnya dan mengubah target Tenaga Bakti Rimbawan menjadi 197 orang pada Renja, PK serta RKA-K/L. Rincian Penempatan Tenaga Bakti Rimbawan berdasarkan jenis KPH dan jenjang Pendidikan adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Rincian Tenaga Bakti Rimbawan berdasarkan Jenjang Pendidikan

Sampai dengan saat ini terdapat total tenaga Bakti Rimbawan yang masih aktif sejumlah 1.536 orang (197 orang dibiayai oleh Badan P2SDM dan 1.339 dibiayai oleh instansi pengguna) yang tersebar di 133 KPHP, 11 KPHK, 77 KPHL, 3 KHDTK dan 6 BDLHK.



Gambar 4. Sebaran Tenaga Bakti Rimbawan yang aktif sampai Tahun 2019

Dalam pelaksanaannya, pencapaian target kinerja ini tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi diantaranya:

1. Tenaga Bakti Rimbawan mengundurkan diri karena diterima sebagai PNS/BUMN/BUMS.
2. Adanya kebijakan pemerintah (PP No. 49 tahun 2018 Tentang Manajemen P3K dan SE.1/MENLHK/SETJEN/PEG.0/1/2019 Tentang Larangan Mengangkat Pegawai non PNS dan/atau non P3K) yang berdampak pada pelaksanaan rekrutmen Bakti Rimbawan tahun 2019.

Upaya yang telah dilakukan oleh Badan P2SDM Untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya:

1. Merivisi target output tenaga Bakti Rimbawan di Renja, PK serta RKA-K/L tahun 2019 dari 228 orang menjadi 197 orang.
2. Optimalisasi pendayagunaan Tenaga Bakti Rimbawan yang sudah direkrut tahun sebelumnya.

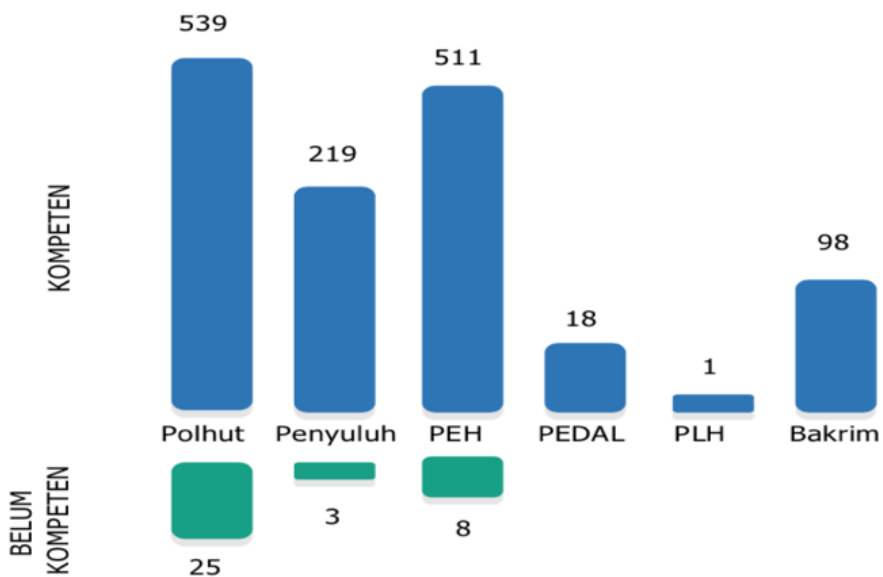
Output yang diperoleh dari penerimaan Tenaga Bakti Rimbawan yaitu tersedianya 197 orang Tenaga Bakti Rimbawan yang mendukung optimalisasi KPH dan KHDTK.

#### **b. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya.**

Uji kompetensi sertifikasi profesi SDM LHK dilaksanakan untuk memperoleh SDM yang kompeten dan profesional dalam melakukan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. SDM lingkungan hidup dan kehutanan, sebagai salah satu pendukung program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan melalui pemberdayaan masyarakat perlu disertifikasi dengan tujuan untuk mengukur dan mengetahui kompetensinya. Sertifikasi juga diharapkan dapat menjamin bahwa presisi serta akurasi hasil kinerja SDM LHK sesuai dengan target program dalam pembangunan LHK.

Target awal kegiatan uji kompetensi sebanyak 1.000 orang, namun pada pertengahan tahun 2019 Badan P2SDM menerima insentif anggaran dari

Kementerian Keuangan sehingga terdapat penambahan target uji kompetensi menjadi 1.300 orang. Selain itu anggaran insentif juga digunakan untuk membentuk 5 Tempat Uji Kompetensi di 5 Balai Diklat LHK (Pekanbaru, Kadipaten, Samarinda, Makassar, Bogor) dan perekrutan assesor sebanyak 89 orang. Adapun pelaksanaan uji kompetensi di 28 Provinsi (38 lokasi) dengan peserta uji sebanyak 1.422 orang dan hasil hasil uji 1.386 orang kompeten dan 36 orang belum kompeten. Adapun rincian peserta uji kompetensi/Sertifikasi SDM LHK per jenis jabatan adalah sebagai berikut:



Gambar 5. Rincian Peserta Uji Berdasarkan Jenis Jabatan



Gambar 6. Kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi

Dalam pelaksanaannya, pencapaian target kinerja ini tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi diantaranya:

1. Belum tersedianya Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi
2. Target Peserta uji kompetensi tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia

Upaya yang telah dilakukan oleh Badan P2SDM Untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya:

1. Membentuk TUK berbasis BDLHK di Pekanbaru, Kadipaten, Samarinda, Makasar dan Bogor
2. Sharing anggaran dengan APBD untuk pelaksanaan uji kompetensi JF Pemda

*Output* dari kegiatan ini yaitu tersedianya 1.386 orang SDM LHK yang kompeten melalui uji sertifikasi.

## B. Capaian Rencana Strategis (Renstra) Pusrenbang SDM Tahun 2015-2019

Keberhasilan pencapaian Renstra Pusrenbang SDM Tahun 2015-2019 diukur dengan membandingkan antara realisasi pada masing-masing indikator kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan target pada Renstra. Hasil pengukuran progres rata-rata IKK Pusrenbang SDM sampai dengan Tahun 2019 sebesar 27,86%. Prosentase ini jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Secara rinci capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pusrenbang SDM sampai dengan Tahun 2019 disajikan sebagaimana Tabel 8.

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusrenbang SDM Sampai Tahun 2019

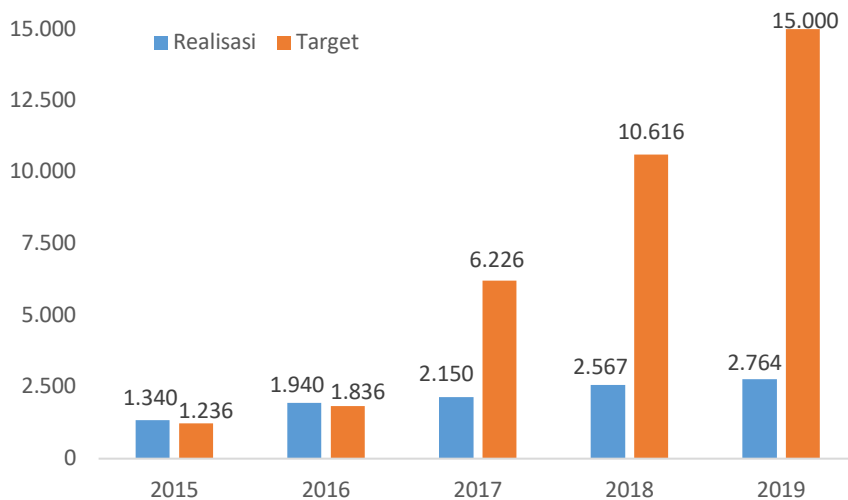
Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target RENSTRA	CAPAIAN					TOTAL	
			2015	2016	2017	2018	2019	OUTPUT	%
Perencanaan dan Pengembangan SDM	Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH	15.000	1.340	600	210	417	197	2.764	18,43
	Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	10.400	1.072	624	530	700	1.386	4.312	41,46
<b>JUMLAH</b>		<b>25.400</b>	<b>2.412</b>	<b>1.224</b>	<b>740</b>	<b>1.117</b>	<b>1.583</b>	<b>7.076</b>	<b>27,86</b>

Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan SDM terdiri dari 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

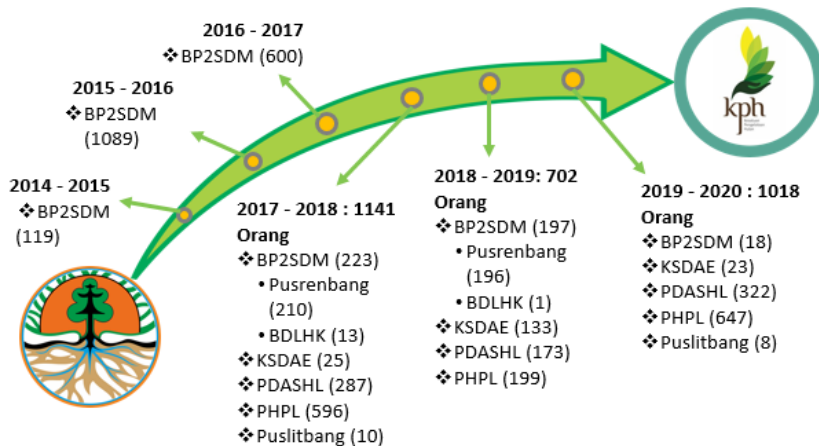
### a. Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH.

Berdasarkan Renstra Pusrenbang SDM Tahun 2015-2019, target tenaga bakti rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH yaitu sebanyak 15.000 orang selama 5 tahun. Pada Tahun 2016 setelah terbitnya Peraturan Menteri LHK Nomor P.70/Menlhk-Setjen/2015 tentang perubahan atas Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2015 tentang Bakti Rimbawan dalam pembangunan kehutanan, tenaga bakti rimbawan berasal dari

lulusan sarjana kehutanan dan pertanian, diploma kehutanan dan SMK Kehutanan serta formasi khusus provinsi Papua Barat. Peta kebutuhan Bakti Rimbawan pada KPH diperoleh melalui koordinasi dengan Eselon I teknis lingkup KLHK. Dalam kegiatan ini, Pusrenbang SDM melaksanakan proses rekrutmen, penempatan, dan pembiayaan tenaga Bakti Rimbawan selama 2 tahun penugasan. Selain itu, kompetensi tenaga bakti rimbawan juga ditingkatkan melalui diklat dan uji kompetensi. Kinerja tenaga Bakti Rimbawan selalu dipantau melalui laporan bulanan maupun monitoring dan supervisi di lapangan. Setelah masa kontrak Bakti Rimbawan berakhir, pembiayaan selanjutnya dibebankan pada instansi pengguna. Progres realisasi capaian s.d Tahun 2019 yaitu sebanyak 2.764 orang atau sebesar 18,43%. Adapun progres capaian tiap tahun selama pelaksanaan Renstra dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 7. Realisasi tenaga Bakti Rimbawan Tahun 2015-2019



Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Renstra, diantaranya:

1. Tenaga Bakti Rimbawan mengundurkan diri dengan alasan keluarga dan diterima sebagai PNS/BUMN/BUMS.
2. Tahun 2019 tidak ada lagi alokasi anggaran untuk rekrutmen tenaga Bakti Rimbawan yang diperlukan oleh KPH.
3. Monitoring dan evaluasi tenaga Bakti Rimbawan tahun 2015 belum dapat menjangkau seluruh tenaga Bakti Rimbawan.
4. Monitoring dan evaluasi tenaga Bakti Rimbawan Tahun 2015-2017 belum mencakup penilaian terhadap absensi, laporan, dan rencana kerja

Untuk itu upaya yang perlu dilakukan oleh Badan P2SDM untuk mengatasi masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan, bimbingan, pembinaan dan evaluasi/penilaian kinerja pelaksanaan tugas tenaga Bakti Rimbawan
2. Melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah/pemprov untuk exit strategy penyelenggaraan Bakti Rimbawan.



3. Tahun 2016 mulai dibangun website monitoring dan evaluasi Bakti Rimbawan, yang dapat diakses oleh seluruh Tenaga Bakti Rimbawan.

Mulai Tahun 2018, penilaian terhadap Bakti Rimbawan dilakukan dengan lima unsur yaitu monev online (kompetensi), absensi, laporan bulanan, penilaian kinerja dari Kepala KPH, serta rencana kerja tahunan.

Outcome dari tersedianya tenaga Bakti Rimbawan yaitu tersedianya tenaga teknis dan administrasi di KPH, percepatan operasionalisasi KPH dan tersedianya tenaga kerja di bidang kehutanan yang profesional. Berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh Tim Pusrenbang SDM LHK, Program Bakti Rimbawan telah terbukti berkontribusi secara signifikan dalam mendukung pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Ketika sebagian besar KPH yang dibentuk pada kurun waktu 2009-2015 masih berkuat pada isu pengembangan kelembagaan dan keterbatasan personil, dukungan tenaga Bakti Rimbawan menjadi sangat berarti untuk menunjang kinerja KPH. Bahkan dalam beberapa kasus ditemukan tenaga Bakti Rimbawan menjadi motor bagi beroperasinya sebuah KPH. Program Bakti Rimbawan ini juga berhasil membuka lapangan kerja bagi para alumni SMK Kehutanan dan Sarjana Kehutanan maupun Sarjana dari disiplin ilmu lain.

Efektivitas program Bakti Rimbawan dalam mendukung pengembangan KPH juga bisa ditunjukkan melalui kontribusi tenaga Bakti Rimbawan dalam pencapaian output tahunan KPH. Bagi Kepala KPH, tenaga Bakti Rimbawan adalah tulang punggung untuk menjalankan rencana kerja KPH, baik di tingkat perencanaan maupun operasional lapangan. Keterbatasan tenaga profesional kehutanan relative bisa terjawab dengan adanya tenaga Bakti Rimbawan. Di luar Bakti Rimbawan, tenaga KPH hanya terdiri dari birokrat kehutanan (PNS) dan tenaga kasar lapangan (kontrak).

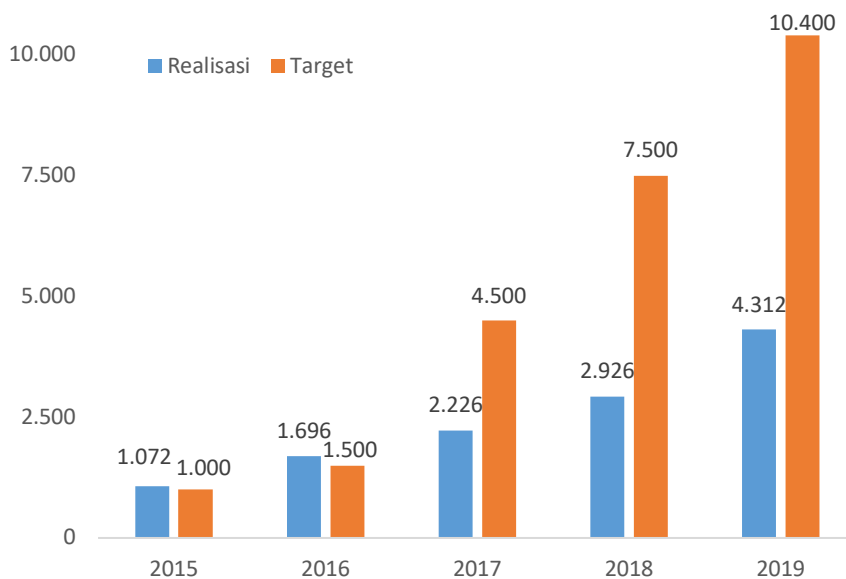
Upaya menopang keberlanjutan tenaga Bakti Rimbawan untuk bisa terus bekerja di KPH tidak selamanya bergantung pada adanya dukungan dari Pemda. Boleh jadi sebagai contoh KPH Rinjani Barat berhasil memperoleh

dukungan yang signifikan dari Pemerintah Provinsi, akan tetapi hampir sebagian besar KPH yang lain tidak berhasil mengikuti jejak KPH Rinjani Barat. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada skema lain yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung keberlanjutan tenaga Bakti Rimbawan.

KPH Gularaya mencoba mengembangkan inisiatif kemitraan wirausaha untuk menopang keberlanjutan tenaga Bakti Rimbawan yang ada di wilayahnya. Melalui skema itu, tenaga Bakti Rimbawan yang ada di sana didorong untuk berhimpun dalam wadah koperasi. Bersama dengan Kepala KPH dan segenap staf KPH yang lain, tenaga Bakti Rimbawan bahu-membahu membentuk koperasi. Mereka memproyeksikan, ke depan, melalui wadah koperasi inilah kemitraan usaha dengan KPH akan dibangun. Keterbatasan Pemda Sulawesi Tenggara untuk menopang keberlanjutan tenaga Bakti Rimbawan di KPH Gularaya, sepertinya tidak menyurutkan langkah tenaga Bakti Rimbawan di sana untuk menempuh jalan lain demi bisa terus bekerja di KPH. Kemitraan usaha dengan KPH adalah jalan yang saat ini sedang dirintis bersama antara Kepala KPH dan segenap tenaga Bakti Rimbawan di sana.

#### **b. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya.**

Berdasarkan Renstra Pusrenbang SDM Tahun 2015-2019, target SDM LHK yang meningkat kompetensinya yaitu sebanyak 10.400 orang selama 5 tahun. Progres realisasi capaian sampai dengan akhir pelaksanaan Renstra yaitu sebanyak 4.312 orang atau sebesar 41,46%. Adapun progres capaian tiap tahun selama pelaksanaan Renstra dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 8. Realisasi SDM LHK Kompeten Tahun 2015-2019

Tabel 9. Progres SDM LHK meningkat kompetensinya berdasarkan jenis jabatan s.d Tahun 2019

No	Jenis Jabatan	Capaian (orang)					Total
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Polhut	381	266	314	378	539	1878
2	Penyuluh Kehutanan	226	40	33	53	219	571
3	Pengendali Ekosistem Hutan	-	260	183	194	511	1148
4	SDM KPH	341	58	-	-	-	399
5	Bakti Rimbawan	124	-	-	-	98	222
6	Pengawas LH	-	-	-	16	-	16
7	Pengendali Dampak Lingkungan	-	-	-	59	18	77
Total		1.072	624	530	700	1.386	4.312

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Renstra, diantaranya:

1. Tidak tersedianya tempat penyimpanan materi uji kompetensi terutama uji kompetensi teknis
  2. Target Peserta uji kompetensi tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia
  3. Belum tersedianya Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi uji sewaktu yg ditetapkan
- Untuk itu upaya yang perlu dilakukan oleh Badan P2SDM untuk mengatasi masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membangun aplikasi uji kompetensi Teknis secara online
2. Sharing anggaran dengan APBD untuk pelaksanaan uji kompetensi JF Pemda
3. Rekrutmen asesor pada Tahun 2015, 2017 dan 2019
4. Pembentukan TUK berbasis BDLHK

Outcome dari kegiatan ini yaitu terjaminnya kegiatan kehutanan oleh tenaga SDM LHK yang kompeten.

## BAB V

### REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan pengembangan SDM, pada Tahun 2019 Pusrenbang SDM didukung alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 15.205.194.000,- yang tertuang pada dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 Satuan Kerja Pusrenbang SDM sesuai dengan Surat Pengesahan Nomor: SP DIPA-029.08.1.400207/2019 tanggal 5 Desember 2018. Kemudian pada bulan Agustus, terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 2.832.470.000,- yang merupakan tambahan anggaran insentif dari Kementerian Keuangan dan pada bulan Oktober terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp 100.000.000,- untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai, sehingga anggaran Pusrenbang SDM pada akhir tahun 2019 sebesar RP. 17.937.664.000.

Dalam pencapaian target kinerja tahun 2019, realisasi penggunaan anggaran tahun 2019 mencapai Rp. 17.934.059.310,- atau 99,98% dari Pagu Anggaran yang tersedia. Adapun rincian anggaran per komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Realisasi Anggaran Kegiatan lingkup Pusrenbang SDM Tahun 2019

Kode	Komponen	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
5440.001	Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH	10.630.740.000	10.629.303.321	99,99 %
5440.002	Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	5.432.470.000	5.430.446.241	99,96 %
5440.950	Penyusunan dokumen rencana kegiatan dan pelaporan	500.000.000	499.929.593	99,99 %
5440.994	Layanan perkantoran	1.374.464.000	1.374.380.155	99,99 %
<b>JUMLAH</b>		<b>17.937.664.000</b>	<b>17.934.059.310</b>	<b>99,98 %</b>

Permasalahan yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja dan realisasi anggaran selama tahun 2019, antara lain:

1. Target output kinerja/IKK pada renstra tidak didukung oleh alokasi anggaran yang memadai, sementara target pada renstra tidak dapat direvisi.
2. Adanya kebijakan pemerintah PP.49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan SE.1/Menlhk/SETJEN/PEG.0/1/2019 tentang larangan pengangkatan pegawai non PNS dan/atau non P3K yang berdampak pada pelaksanaan rekrutmen Bakti Rimbawan Tahun 2019.

Sehubungan dengan adanya beberapa permasalahan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, tindak lanjut yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja tahun berjalan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja tahun berjalan yang disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima.
2. Peningkatan kerjasama antara Pusrenbang SDM dengan pihak-pihak/instansi yang terkait dalam pelaksanaan Uji Kompetensi untuk pencapaian target kinerja.
3. Optimalisasi pendayagunaan tenaga Bakti Rimbawan yang sudah direkrut tahun sebelumnya

## **BAB VI PENUTUP**

Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Pusrenbang SDM Tahun 2019 sebesar 105,74%. Capaian tersebut meningkat dibandingkan capaian Tahun 2018 yaitu sebesar 97,74% sehingga menghasilkan nilai efektivitas sebesar 1,08 (efektif). Penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja tersebut sebesar 99,98% dari pagu anggaran sehingga nilai efisiensi sebesar 1,06 yang berarti Pusrenbang SDM telah optimal dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pusrenbang SDM dalam penyelenggaraan kegiatan Perencanaan dan Pengembangan SDM telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kepala Badan P2SDM, laporan ini diharapkan dapat menggambarkan garis besar pelaksanaan kegiatan Pusrenbang SDM dalam rangka mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2019 seperti yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Akhirnya dengan disusunnya laporan ini diharapkan dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan perencanaan selanjutnya.

# LAMPIRAN



Lampiran 1. Rincian Penempatan Tenaga Bakti Rimbawan

Provinsi	Nama KPH	S1	SMK	Total
Aceh	KPH WILAYAH I	2	3	5
Aceh	KPH WILAYAH II	2	3	5
Aceh	KPH WILAYAH IV	1	3	4
Aceh	KPH WILAYAH VI	1		1
Sumatera Utara	KPH Wil. I Stabat	2	4	6
Sumatera Utara	KPH Wil. II Pematang Siantar	3	2	5
Sumatera Utara	KPH Wil. XIV Sidikalang	2	4	6
Sumatera Utara	KPH Wilayah XV Kabanjahe	2	4	6
Riau	KPH Mandau		1	1
Riau	KPH Rokan	1		1
Riau	KPH Sorek		2	2
Riau	KPH Suligi - Batu Gajah		1	1
Riau	KPHP Hilir (Unit VIII) Sarolangun		1	1
Riau	KPHP Minas – Tahura	2		2
Riau	KPHP Unit V Natuna		1	1
Riau	UPT KPH Tebing Tinggi		1	1
Kepulauan Riau	KPHP Unit V Natuna	2	2	4
Kepulauan Riau	Unit II Batam		4	4
Jambi	KPHP Hilir (Unit VIII) Sarolangun	3	1	4
Jambi	KPHP Tanjung Jabung Timur	1	4	5
Jambi	KPHP Tanjung Jabung Barat	1	8	9
Jambi	KPHP Unit XII	1	4	5
Jambi	KPHP Unit XIII Muaro Jambi	1	5	6
Sumatera Selatan	KPH Wil IV Sungai Lumpur	5	4	9
Sumatera Selatan	KPHP Unit V Lempiung - Mesuji	2	8	10
Sumatera Selatan	KPHP Unit XIX	1	4	5
Sumatera Selatan	KPHP Unit XX	1	4	5
Bangka Belitung	KPH Belantu Mendanau (Unit X)		3	3
Bangka Belitung	KPHL Unit XII Kab. Belitung Timur		3	3
Bangka Belitung	KPHP Muntai Palas	1		1
Bangka Belitung	KPHP Sungai Sembulan		2	2
Bangka Belitung	KPHP Unit VII LUBUK	1	3	4
Lampung	KPH Unit X Pematang neba	1	2	3
Jawa Barat	BDLHK BOGOR	1	2	3
Jawa Barat	BDLHK Kadipaten		2	2
NTB	BKPH Ampang Plampang	1	3	4
NTB	BKPH Ampang Riwo Suromandi	1	3	4
NTB	BKPH Maria Donggomasa	1	2	3
NTB	BKPH Pucak Ngengas Batulanteh	1	3	4
NTB	KPH Wil. Orong Telu Brang Breh	2	9	11
NTT	KPH Wil. Kab. Kupang	2	6	8

<b>Provinsi</b>	<b>Nama KPH</b>	<b>S1</b>	<b>SMK</b>	<b>Total</b>
NTT	KPH Wil. Kab. Sumba Timur	1	3	4
Kalimantan Barat	KPH Ketapang Selatan	2	7	9
Kalimantan Barat	KPH Melawi	1	5	6
Kalimantan Barat	KPH Sintang Timur	2	6	8
Kalimantan Barat	KPH Wil. Kapuas Hulu Timur (Unit XX)		3	3
Kalimantan Barat	KPH Wil. Kapuas Hulu Utara (Unit XIX)		2	2
Kalimantan Barat	KPH Wil. Ketapang Utara	1	2	3
Kalimantan Barat	KPHK Gunung Melintang	2		2
Kalimantan Barat	KPHP Unit VIII Mempawah	1	4	5
Kalimantan Barat	KPHP Unit XXXIII Kubu Raya	2	6	8
Kalimantan Barat	Resort KSDA Mandor		1	1
Kalimantan Barat	Resort KSDA Serimbu		1	1
Kalimantan Tengah	KPHP Barito Hilir		2	2
Kalimantan Tengah	KPHP barito Tegah Unit XXIV	1	3	4
Kalimantan Tengah	KPHP Kahayan Hilir Unit XXXI	1	1	2
Kalimantan Tengah	KPHP Kahayan Tengah	1	4	5
Kalimantan Tengah	KPHP Katingan Hulu		1	1
Kalimantan Tengah	KPHP Sukamara - Lamandau		6	6
Kalimantan Tengah	KPHP Unit X	1	4	5
Kalimantan Tengah	KPHP Unit XI	1	3	4
Kalimantan Tengah	KPHP Unit XVII	1	4	5
Kalimantan Tengah	KPHP Unit XXVII Mentaya Tengah - Seruyan Hilir	1	4	5
Kalimantan Tengah	KPHP Unit XXVIII Mentaya Tegah - Seruyan Hilir	1	3	4
Kalimantan Tengah	KPHP Unit XXX Kalimantan Tengah	1	4	5
Kalimantan Tengah	UPT KPHP Mentaya Hulu - Seruyan Tengah Unit XIX & XX	1	4	5
Kalimantan Selatan	KPH Cantung		1	1
Kalimantan Selatan	KPH Kusan		1	1
Kalimantan Timur	BDLHK Samarinda		5	5
Kalimantan Timur	KPHP Bongan (Unit XXXII)		2	2
Kalimantan Timur	KPHP Das Belayan (XXVI)		2	2
Kalimantan Timur	KPHP Telakai (XXXIII)	1		1
Kalimantan Utara	KPHP Tana Tidung (Unit VII)	1	1	2
Sulawesi Utara	KPHL Unit III Sangihe, Sitaro, Talaud		6	6
Sulawesi Utara	KPHL Unit V		3	3
Sulawesi Utara	KPHL Unit VI Minahasa Utara - Bitung - Manado	1	1	2
Sulawesi Tengah	KPH Dampelas (Unit III)	2	5	7
Sulawesi Tengah	KPH Dolago Tanggunung	1	2	3
Sulawesi Tengah	KPH Kulawi (Unit VIII)		3	3
Sulawesi Tengah	KPH Tepe Asa Maroso	1	1	2
Sulawesi Tenggara	KPH Gantara	1	1	2
Sulawesi Tenggara	KPH Mekongga Utara XIII		2	2

<b>Provinsi</b>	<b>Nama KPH</b>	<b>S1</b>	<b>SMK</b>	<b>Total</b>
Sulawesi Tenggara	KPH Unit V Wakonti	1	1	2
Sulawesi Tenggara	KPH Unit VI Pulau Muna	1	2	3
Sulawesi Tenggara	KPHL Ueesi (Unit XIV)	1	1	2
Sulawesi Tenggara	KPHL Wakatobi	1	2	3
Sulawesi Barat	KPH Karama		2	2
Sulawesi Barat	KPHL Mamasa Timur (Unit IX)	1	1	2
Gorontalo	KPH WIL I-II POHUWATO		2	2
Maluku	KPH Ambon	1	1	2
Maluku	KPH Seram Bagian Timur	2	6	8
Maluku	KPHL Unit XV Maluku	1	2	3
Maluku	KPHP Model Unit III Wae Tina	1		1
Maluku	KPHP P. Molkar - P. Trangan		2	2
Maluku Utara	KPH Halmahera Barat		3	3
Maluku Utara	KPH Halmahera Selatan	1	2	3
Maluku Utara	KPH Halmahera Tengah		4	4
Maluku Utara	KPH Halmahera Utara		4	4
Maluku Utara	KPH Pulau Morotai	1	3	4
Maluku Utara	KPH Ternate-Tidore		3	3
Maluku Utara	KPHP Halmahera Timur (Unit IV)	1	1	2
Maluku Utara	KPHP Kepulauan Sula Unit XV (Maluku Utara)	1	2	3
Papua	KPHK Cyclop - Teluk Youtefa	2	6	8
Papua	KPHP Unit II Nabire		5	5
Papua	KPHP Unit LIII Boven Digoel		4	4
Papua	KPHP Unit XLIII - Nduga		3	3
Papua	KPHP Unit XLIX		5	5
Papua	KPHP Unit XLVIII		4	4
Papua	KPHP Unit XXIII Sarmi		8	8
Papua Barat	KPHP Fakfak (Unit XVI)	1	1	2
Papua Barat	KPHP Unit IV Tambraw		2	2
<b>Total</b>		<b>95</b>	<b>322</b>	<b>417</b>

## Lampiran 2. Rekapitulasi Data Pelaksanaan Uji Kompetensi Tahun 2019

No	Provinsi	Polhut		Penyuluh		PEH		Pedal		PLH		Bakti Rimbawan		TOTAL	
		K	BK	K	BK	K	BK	K	BK	K	BK	K	BK	K	BK
1	Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sumatera Barat	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
3	Sumatera Selatan	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	31	0
4	Riau	31	1	2	0	44	4	0	0	0	0	17	0	94	5
5	Riau 2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
6	Jambi	22	0	4	0	14	0	0	0	0	0	0	0	40	0
7	Jambi 2	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0
8	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Lampung	41	1	5	0	27	0	0	0	0	0	0	0	73	1
10	Lampung 2	16	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	9
11	Lampung 3	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0
12	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	DKI Jakarta 1	24	0	2	1	81	2	0	0	0	0	0	0	107	3
14	DKI Jakarta 2	43	1	7	0	57	0	6	0	0	0	0	0	113	1
15	DKI Jakarta 3	31	0	13	1	50	2	12	0	1	0	0	0	107	3
16	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jawa Tengah 2	8	0	2	0	13	0	0	0	0	0	0	0	23	0
19	Jawa Tengah 3	0	0	50	0	6	0	0	0	0	0	0	0	56	0
20	D.I. Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0
21	Jawa Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bali	23	1	9	0	34	0	0	0	0	0	16	0	82	1
23	NTT	7	2	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	29	3
24	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0
25	Kalimantan Barat	16	0	1	0	26	0	0	0	0	0	0	0	43	0
26	Kalimantan Timur	3	0	15	0	19	0	0	0	0	0	0	0	37	0
27	Kalimantan Utara	5	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	11	0
28	Kalimantan Selatan	17	1	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	1
29	Sulawesi Selatan	22	1	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0	103	1
30	Sulawesi Selatan 2	30	0	21	0	3	0	0	0	0	0	10	0	64	0
31	Sulawesi Selatan 3	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
32	Sulawesi Tengah (INPASSING)	36	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	7
33	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0
34	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13	0
35	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0
36	Maluku	18	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	24	0
37	Papua	14	0	1	0	18	0	0	0	0	0	0	0	33	0
38	Papua Barat	11	1	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	37	1
39	Bangka Belitung	7	0	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	16	0
<b>Jumlah Tahun 2019</b>		<b>539</b>	<b>25</b>	<b>219</b>	<b>3</b>	<b>511</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>1.386</b>	<b>36</b>